

PROSIDING

VENNAS AIHII

KONVENSI NASIONAL
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif
Hubungan Internasional

Makassar, 23 November 2016



ISSN: 2549-6689



9 772549 668881

Dewan Redaksi

Advisor

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII), Tirta N. Mursitama.
- (2) Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, H. Darwis

Head of Editorial Board

Ishaq Rahman

Editor

Pusparida Syahdan
Agussalim Burhanuddin
Ashry Sallatu
Aswin Baharuddin
Nur Utaminingsih

Desain-Layout

Satkar Ulama

Diterbitkan oleh:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin

bersama

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII)

Disclaimer

Setiap paper dalam prosiding ini adalah hasil karya masing-masing penulisnya sebagaimana tercantum pada setiap paper. Sebagai karya akademik, setiap penulis adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap validitas data, analisis, dan kesimpulan, serta terhadap keseluruhan isi paper.



Sambutan Pengurus Pusat AIHII

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya Konvensi Nasional (Vennas) ke-7 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) pada tanggal 23 – 24 November 2017 dengan lancar dan sukses. Salah satu bukti keberhasilan tersebut adalah tersusunnya Prosiding Vennas ke-7 AIHII dengan tema “Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional” ini.

Vennas ke-7 AIHII merupakan salah satu pertemuan nasional terbesar dengan jumlah partisipan sebanyak 138 orang yang berasal dari 45 program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia dan perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Bila dilihat dari jumlah abstrak yang masuk dapat dikategorikan cukup banyak yaitu 91 abstrak dan 73 di antaranya dipresentasikan di dalam pertemuan ilmiah. Pada akhirnya, jumlah artikel lengkap (full paper) yang berhasil dihimpun dalam prosiding ini sebanyak 40 artikel ilmiah.

Sebagai salah satu kegiatan tahunan, pertemuan ilmiah Vennas merupakan wahana yang ditunggu-tunggu oleh komunitas epistemik HI di Indonesia. Dalam pertemuan ilmiah ini dipresentasikan berbagai penelitian terbaru dan pemikiran mutakhir para penstudi HI di Indonesia dalam menganalisis berbagai fenomena HI yang terjadi di dunia. Banyak pemikiran menarik terutama tentang maritim Indonesia ditelaah dari sudut pandang Ilmu HI.

Pertemuan ilmiah ini sekaligus menjadi ajang *knowledge sharing* dan *knowledge creation* yang pada akhirnya mengerucut pada pencarian intelektual tentang kajian HI yang memiliki ciri khas ke-Indonesiaan. Yaitu, sebuah cara pandang yang berpijak pada identitas, budaya, kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia atas tafsir fenomena HI yang terjadi. Dengan demikian, analisis tersebut dapat menawarkan sesuatu kebaruan dalam khasanah HI di tataran global; bukan sekedar replikasi sudut pandang HI global atau kalangan “Barat” (*western*) terhadap apa yang terjadi dan dikaitkan dengan posisi dan peran Indonesia.

Perjalanan menuju hal tersebut tentu masih panjang. Banyak perdebatan dapat muncul dari berbagai kalangan komunitas epistemik HI Indonesia. Namun, jalan menuju ke sana telah dirintis dan mari terus kita kembangkan demi kemajuan AIHII dan bangsa Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih

kepada seluruh panitia Vennas ke-7 AIHII, para pengurus AIHII, anggota AIHII, Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan para pihak yang telah membantu terselenggaranya Vennas ke-7 AIHII ini dengan sukses.

Jakarta, 1 Desember 2016

Ketua Umum Pengurus Pusat
Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)

Prof. Dr. Tirta N. Mursitama, PhD



Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya kepada kita semua dalam pelaksanaan Konvensi Nasional VII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) yang berjalan sukses dan berhasil menerbitkan Buku Prosiding ini. Konvensi kali ini mengangkat tema “**Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional**”. Prosiding ini memuat rangkuman singkat mengenai materi yang dibahas oleh para narasumber dalam Seminar Nasional, dan juga memuat seluruh makalah yang dipresentasikan pada Sidang Akademik dalam rangkaian Konvensi Nasional VII AIHII di Makassar, 23 November 2016.

Tema ini dipilih dengan dasar pemikiran bahwa topik kemaritiman telah menjadi isu hangat pada level nasional maupun global. Pada level nasional, isu maritim menjadi sentral karena visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini membuka ruang bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang ada di Indonesia.

Sidang Akademik Konvensi Nasional VII terbagi dalam 4 (empat) sub tema, yaitu: (1) Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional; (2) Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN; (3) Keamanan, Demokrasi dan Masyarakat Transnasiona; dan (4) Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, juga terdapat forum akademik dengan tema khusus, yaitu “Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE)”, dan *National Integrity System and Anti Corruption*.

Selain presentasi akademik, Konvensi Nasional VII juga diisi dengan beberapa kegiatan yang merupakan ajang pertemuan organisasi AIHII. Dalam sidang organisasi, dibahas berbagai isu keilmuan dan proses akademik di perguruan tinggi setiap anggota AIHII, mendiskusikan alternatif pengembangan, dan juga upaya-upaya untuk memperkuat organisasi.

Prosiding menyajikan seluruh makalah yang dipresentasikan selama konvensi. Seluruh penyaji pada kegiatan ini adalah peneliti Hubungan Internasional yang sebagian besarnya merupakan dosen program studi Hubungan Internasional dari 45 universitas anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia.

Akhir kata, kami dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII),

sponsor kegiatan, para penyaji, para peserta dan panitia yang sudah berkenan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Kami berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi niat dan usaha baik kita semua.

Makassar, 1 Desember 2016

Ketua Departemen Hubungan Internasional
FISIP Universitas Hasanuddin

H. Darwis, Ph.D



Pengantar Editor

Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia

Ishaq Rahman

Head of Editorial Board (Universitas Hasanuddin, Makassar)

ishaq@fisip.unhas.ac.id

Konvensi ini mengambil tema “Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional”. Tema ini dipilih dengan dua pertimbangan. Pertama, isu benua maritim saat ini sedang menjadi salah satu fokus perhatian para penstudi hubungan internasional, baik nasional maupun internasional. Pada level nasional, langkah Presiden Joko Widodo yang menjadikan tema maritim sebagai fokus kebijakan pembangunan saat ini telah mendorong peningkatan kajian dalam berbagai bidang.

Kedua, tema maritim merupakan isu hangat dalam hubungan internasional yang banyak mewarnai arah kebijakan negara-negara di dunia, yang dengan sendirinya membuka ruang kajian lebih luas dan variatif bagi para penstudi ilmu hubungan internasional. Pada tataran regional Asia Timur dan Tenggara, isu klaim berlapis terhadap Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang menempatkan Republik Rakyat Tiongkok sebagai aktor penting, beririsan dengan fenomena kebangkitan Tiongkok dalam interaksi global.

Prosiding ini menyajikan gagasan dan pemikiran dari para penstudi hubungan internasional dari seluruh Indonesia. Secara sistematis, pembagian bahasan dalam prosiding ini mengacu pada pengelompokan paper yang dipresentasikan pada konvensi. Masing-masing sub tema dalam prosiding ini menggambarkan karakter akademik yang saat ini sedang berkembang dalam kajian hubungan internasional di Indonesia.

Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional

Demokrasi sedang menjadi trend global, terutama dalam 25 tahun terakhir. Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, dunia internasional telah menyaksikan transisi demokrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, hingga fenomena Arab Spring yang terjadi pada penghujung 2011. Dalam konteks

demokrasi, gagasan tentang keamanan juga mengalami pergeseran makna dari keamanan wilayah (*territorial security*) menuju keamanan manusia (*human security*), dan setelah peristiwa 9/11, menuju *pre-emptive security*. Bahkan, pada banyak negara-negara yang bertransisi kini sedang terjadi fenomena pertukaran (*tradeoff*) antara keamanan dan demokrasi (Pavone, Gomez, dan Jaquet-Chivelle, 2016). Gejolak keamanan tampak terjadi pada negara-negara yang bertransisi, meskipun pada level ancaman yang berbeda-beda dan variasi eskalasi yang dinamis.

Prosiding ini menyajikan variasi gagasan tentang keamanan, demokrasi, dan masyarakat transnasional dengan pendekatan yang beragam. Mulai dari gagasan tradisional tentang keamanan wilayah, hingga gagasan kontemporer tentang keamanan siber. Adi Rio Arianto (halaman 18) bahkan melihat realitas ini bukan saja sebagai isu keamanan siber *an sich*, tetapi telah menjangkau dimensi-dimensi geopolitik dan keseimbangan arsitektur keamanan global, melalui apa yang dia istilahkan sebagai "geometripolitika", suatu gagasan yang belum kita temukan dalam literatur mainstream. Arianto mengulas bagaimana level rasionalitas, kapabilitas, dan probabilitas senjata nuklir sebagai instrumen pemusnah massal disandingkan dengan ancaman perang siber yang lebih kontemporer.

Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional

Dinamika pemikiran teoritik dalam hubungan internasional masih terus mencari bentuk yang aplikatif dan dapat memberi penjelasan memuaskan terhadap peristiwa-peristiwa internasional. Epistemologi ilmu nampaknya semakin kokoh dengan diterimanya kesepahaman diantara para pengkaji bahwa tidak ada satu teori dan metodologi tunggal yang mampu mengayomi kompleksitas studi ini. Maka, karakter perkembangan teori akan selalu mengikuti perkembangan, yang sesuai dengan karakter ilmu-ilmu sosial secara umum.

Ada gejala "kembali"-nya pencarian metodologi terhadap aspek-aspek sosial, kultural, dan historis yang sempat diabaikan. Gagasan yang dituangkan Rizal A. Hidayat (halaman 225) menelaah pendekatan teori sosiologi sejarah dalam penelitian hubungan internasional. Anggapan pendekatan ini sebagai "*the second class theory*" sepertinya menarik untuk ditelaah kembali. Pada dekade 1990-an, beberapa peneliti sebenarnya telah membuka ruang bagi penerapan pendekatan sosial murni terhadap kajian hubungan internasional, seperti karya Yosef Lapid dan Friedrich V. Kratochwil (ed) yang berjudul: "The Return of Culture and Identity in International Relations Theory" (1996).



Pencarian pendekatan alternatif untuk menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional telah dimulai sejak akhir dekade 1980-an. Nicholas Greenwood Onuf memperkenalkan *konstruktivisme* dalam "World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and Internasional Relations" (1989), dan secara intensif dan konsisten dipromosikan oleh Alexander Wendt melalui serangkaian artikel dan buku. Emil Radhiansyah dan Tatok D. Sudiarto (halaman 51) mencoba melakukan telaah terhadap keputusan arbitrase pengadilan internasional mengenai Laut China Selatan dengan mengadopsi gagasan konstruktivis. Begitu juga Ali Maksum (halaman 215) menggunakan pendekatan alternatif ini untuk menjelaskan isu-isu kontemporer di Asia Tenggara.

Ekonomi Politik Benua Maritim

Pendekatan ekonomi politik internasional sejak Adam Smith, John Stuart Mill, atau Immanuel Kant (dengan gagasan klasik tentang liberalisme ekonomi) maupun ide-ide tentang interdependensi yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph S. Nye, hingga pendekatan globalisasi yang antara lain diusung oleh Anthony Giddens, Thomas L. Friedman, dan puluhan akademisi dan penulis, nampaknya masih menjadi sentrum kajian, baik yang bersifat promotif maupun kritis. Sementara itu, perspektif kontemporer sebagaimana ditawarkan oleh Benjamin Jerry Cohen (yang membagi tegas antara perspektif Amerika dan Inggris) masih kurang memperoleh perhatian dalam kajian ekonomi politik internasional.

Para peneliti dalam konvensi ini didominasi oleh peminatan yang fokus pada peranan negara, kelompok negara-negara (organisasi internasional dan multilateralisme), serta perusahaan multi nasional. A. Irawan J.H (halaman 306) atau Rahmi Fitriyanti (halaman 354) membahas tentang perspektif kepentingan nasional antara Indonesia dan Tiongkok sesuai dengan karakter strategi pengembangan maritim setiap negara. Sementara Ignatius Ismanto (halaman 324) memilih perspektif multilateral dalam melihat dinamika ekonomi politik di ASEAN.

Dalam pandangan penulis, apa yang disajikan oleh para peneliti dan penstudi hubungan internasional masih bersifat tradisional dan belum berani keluar dari kungkungan perspektif-perspektif klasik ekonomi politik internasional. Tentu saja hal ini sama sekali bukan sesuatu yang salah, sebab pada tingkat global sekalipun pendekatan yang sama masih terjadi. Satu hal yang menarik adalah keberanian untuk menempatkan pendekatan ekonomi politik internasional untuk menelaah fenomena akar rumput, sebagaimana ditunjukkan dalam makalah Sri Suwartiningsih (halaman 374) yang menguraikan tentang ekonomi politik pada

masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Tentu saja, kita akan kembali pada perdebatan klasik epistemologi keilmuan tentang obyek kajian studi hubungan internasional. Akan tetapi, sebagaimana penulis kemukakan di atas, selalu ada ruang yang dinamis bagi pendekatan-pendekatan alternatif dalam kajian hubungan internasional.

Perspektif Indonesia

Dari kelima panel yang tersedia, sebagian besar paper terdistribusi pada panel “Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN”. Hal ini menunjukkan bahwa *main stream* perkembangan penelitian di ranah kajian hubungan internasional Indonesia cenderung bersifat *inward looking*, yaitu lebih didominasi oleh upaya pencarian terhadap model kajian dan fokus penelitian yang menunjukkan karakter ke-Indonesia-an. Kekhasan ini juga terlihat dari hadirnya dua makalah yang mencoba mengupas tentang fenomena korupsi dalam perspektif global. Pada satu sisi, fenomena korupsi yang cenderung domestik dianalisis dengan argumen-argumen gerakan global melawan korupsi.

Salah satu kritik yang hingga kini masih mewarnai aplikasi studi hubungan internasional adalah bagaimana *membumikan* kajian ini, terutama menjadikan ilmu ini sebagai kebutuhan aktual masyarakat. Secara tradisional, ulasan atau studi tentang perang dan damai, diplomasi, kerja sama pada forum-forum yang berskala global, dan sebagainya, dinilai sebagai “kebutuhan elit” dibanding “kebutuhan masyarakat”. Di sisi lain, seiring dengan karakter interaksi global yang semakin meluruhkan batas-batas negara dan hambatan-hambatan dalam interaksi antarbangsa, terjadi pula perluasan tema dan fokus penelitian studi ilmu hubungan internasional, hingga mencakup pula tema-tema yang dinilai generik ilmu sosial.

Variasi (keluasan) dan kedalaman tema seperti inilah yang mewarnai fokus prosiding ini, bergandengan dengan isu kajian maritim sebagai tema utama.

Referensi

Vincenzo Pavone, Elvira Santiago Gomez & David-Olivier Jaquet-Chiffelle, “A Systemic Approach to Security: Beyond the Tradeoff between Security and Liberty”, ***Journal of Democracy and Security***, Vol. 12, No. 4, 2016.

Robert Howard Jackson and Georg Sørensen, ***Introduction to International Relations: Theories and Approaches***, 4th Edition. Oxford University Press, 2010.



Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, *International Organization*, Vol. 46, no. 2, 1992.

Daftar Isi

Dewan Redaksi	iii
Disclaimer	iv
Sambutan Pengurus Pusat AIHI.....	v
Kata Pengantar	vii
Pengantar Editor.....	ix
Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia	ix
Daftar Isi	xiv
Keynote Speech.....	1
Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si	1
Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani.....	3
Panel 1: Keamanan, Demokrasi, dan Masyarakat Transnasional	5
Indonesia dalam Arus <i>Multi-track Regionalism</i> Asia Tenggara	7
Keamanan Siber Menuju Perang Geometri Antarbangsa: Geometripolitika dan Arsitektur Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21	18
Peranan Negara Negara Besar di Kawasan Pasifik Barat Daya dalam Percaturan Global	37
Dampak Keputusan Arbitrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan terhadap Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara	51
Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam <i>Global War Against Terrorism</i>	76



The People’s Republic of China Claim of South China Sea on Indonesia Sovereignty (2014 - 2015).....	92
Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus: Konflik Poso)	131
Pengembangan Sistem Senjata Otonom Mematikan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Internasional.....	145
The <i>Islamic State of Iraq and Syria</i> (ISIS): A Threat to Indonesia?	161
Menanggulangi Migrasi Ireguler di Laut: Bakamla dan Manajemen Keamanan Maritim di Indonesia	178
Dimensi Maritim Dalam Isu Ketidakamanan Energi Tiongkok Di Asia Timur	194
Panel 2: Teori dan Metodologi Ilmu Hubungan Internasional	215
Isu-Isu Kontemporer Asia Tenggara: Sebuah Analisa Awal	217
Pendekatan Teori Sosiologi Sejarah (<i>Historical Sociology</i>) Dalam Penelitian Studi Hubungan Internasional.....	227
Studi Pemikiran Tan Malaka Dalam Mengkonstruksi Hubungan Internasional Perspektif Indonesia	244
Pemaknaan Kembali Konsep “Internasional” dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Komparatif Pembangunan Kota Ramah HAM, Kesepakatan Agenda 2030, Perumusan Visi ASEAN 2025 dan Kerja sama Perpajakan Global.....	264
Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia : Tinjauan Postmodernisme	286
Panel 3: Ekonomi Politik Internasional	305
Beberapa Konsiderasi Kritis bagi Sinergi Poros-Maritim (Indonesia) dan OBOR/ <i>One Belt One Road</i> (Tiongkok)?	307
Ekonomi-Politik Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).....	325
Strategi Peningkatan Ekonomi Negara Maritim Indonesia dalam Prespektif Global	340
Implikasi Jalur Sutra Maritim Cina Terhadap Pembangunan Geoekonomi Maritim Indonesia	355

Ekonomi Politik Pada Masyarakat Perbatasan Indonesia – Malaysia..	375
Tough Diplomacy on The Sea: Impact of Illegal Fishing on Indonesia-China Relations	393
Jatuhnya Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomatik Saudi Arabia-Amerika Serikat.....	406
Panel 4: Diplomasi Indonesia dan Masyarakat ASEAN.....	418
Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi Asean	420
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Daya Saing Industri Indonesia	439
Diplomasi Budaya dan Penguatan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN.....	458
Menemukan Peran Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Worldview Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 2004-2014	473
Analisis Kebijakan Luar Negeri <i>One Door Policy</i> Indonesia Terhadap Bantuan Kemanusiaan Internasional	484
Diplomasi BVK Dalam Menarik Minat Wisatawan Manca Negara Ke Indonesia	498
Track Two of Multi Track Diplomacy: Non Government or Private Sector As A Strategy In Create Prosperity Indonesia Border Area With Malaysia In Facing Human Security Issues	513
Reorientasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Tenggara Pasca Runtuhnya Rezim Soeharto.....	532
Multikulturalisme sebagai Pembentuk Gaya Diplomasi Indonesia dan Pengaruhnya Di ASEAN	556
Diplomasi Ekonomi dalam Kerjasama Selatan-Selatan: Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia	573
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Konektivitas ASEAN (Studi Kasus: Di Masa Pemerintahan Jokowi)....	599
Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Pariwisata Maritim (Pilar Ketiga Poros Maritim) Melalui Diplomasi Kebudayaan di Kawasan Asia Tenggara	622
Diplomasi Batik Indonesia di Era MEA.....	633

Penegakan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara, Piagam ASEAN Serta Upaya Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015: Kasus Peradilan Khmer Merah di Kamboja (2005-2015)	647
Laut Indonesia Sebagai Magnet Asia dan Dunia.....	671
Strategi Indonesia dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan	689
Quo Vadis Organisasi Internasional? Studi Kasus Peran ASEAN dalam Pencemaran Udara Lintas Batas di Asia Tenggara	710
Panel 5: National Integrity System and Global Anti-corruption	729
Diplomasi Anti Korupsi: Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	731
Analisis Integritas Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Kasus Liberalisasi Pelayanan Dalam Bidang Hukum di Indonesia.....	746

Keynote Speech

Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, M.Si

Isu maritim menjadi penting dalam kajian Hubungan Internasional karena konsep kekuatan maritim (*maritime power concept*) dapat dihitung secara matematis. Kekuatan maritim suatu negara merupakan kombinasi dari faktor geografi, kapabilitas ekonomi, kapabilitas militer, kapabilitas teknologi, serta tujuan strategis kekuatan maritim suatu negara dan keinginan negara tersebut untuk menjalankan strategi maritim. Kekuatan maritim juga merupakan instrumen utama dalam kebijakan militer, yang juga menjadi salah satu potensi ekonomi suatu negara (khususnya sebagai sumber energi dan batas wilayah).

Terdapat lima Pilar Maritim Indonesia, yaitu budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim. Konsep benua maritim memiliki keterkaitan dengan transformasi geo-maritim di Indonesia, terutama dalam konteks nusantara yang mengembangkan integrasi nasional dalam konteks kedaulatan. Selain itu, Indonesia tengah melakukan reorientasi pembangunan yang bertumpu pada laut, mengingat posisi Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia, sebagai salah satu *checkpoint* yang terpenting di dunia, dimana lebih dari 40% dari total perdagangan dunia melalui perairan di Indonesia. Selat Malaka, misalnya, memiliki kapasitas *deadweight tonnage* sebesar 300,000 dwt, dimana angka ini lebih besar dari Terusan Suez dan Terusan Panama. Ini berarti bahwa Selat Malaka memungkinkan lebih banyak barang yang diangkut dibandingkan kedua terusan tadi.

Kompetisi politik global juga semakin kuat dimana dua pengaruh besar dunia pada saat ini, AS dan Tiongkok, semakin memfokuskan pengaruhnya pada perairan dunia, khususnya Laut China Selatan (LCS). Ini disebabkan karena pendulum geopolitik dan geoekonomi yang telah bergeser ke kawasan Asia, 70% perikanan dunia berada di Asia Pasifik, 30% produk perikanan dunia dipasok dari Indonesia, dan 10% dari tangkapan ikan dunia berada di kawasan LCS. Jalur transportasi laut kawasan Asia pun dianggap semakin penting, mengingat total nilai kargo yang mencapai USD 5 triliun per tahun.

Dalam membangun kemitraan maritim, diperlukan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi, serta prioritas kerjasama internasional maupun regional. Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya berpotensi sebagai pintu gerbang dan pusat aktivitas ekonomi maritim dunia, tetapi juga penyangga maritim kawasan. Di samping itu, yang dapat menjadi prioritas Indonesia dalam kerjasama internasional maritim antara lain adalah *maritime governance* (pembangunan kapasitas), *maritime civil and criminal authority* (penegakan hukum), *maritime defense* (kerjasama keamanan), *maritime safety* (keamanan lingkungan dan negosiasi), *maritime response and recovery* (pencarian dan penyelamatan di laut), serta *maritime economy* (transportasi dan perdagangan).

Speaker Bio: Abdul Rivai Ras

Perwira yang telah melalui berbagai penugasan mulai dari tingkat operasional sampai pada tingkat kebijakan strategis. Ia mengikuti pendidikan Perwira Karier ABRI Angkatan I dan melanjutkan berbagai pendidikan kedinasan militer dan non militer di dalam dan luar negeri, dengan pendidikan tertinggi di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional pada Elliot School of International Affairs, George Washington University. Ia menempuh pendidikan non-militer program pascasarjana Manajemen Operasional-Strategik, Kajian Ketahanan Nasional, Ilmu Politik Hubungan Internasional dan program doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia.



Indonesia dan ASEAN Lima Tahun ke Depan, Prof. Dr. Yanyan Mochamad Yani

Tantangan utama hubungan internasional di ASEAN adalah kehadiran pihak asing. China semakin memperkuat eksistensinya ASEAN dengan upaya membangun navigasi dan fasilitas keamanan di wilayah archipelago serta garis laut Indonesia, setelah baru-baru ini membangun pelabuhan di Sri Lanka. Aktor besar lain seperti AS juga hadir dengan menempatkan pangkalan militer dan sekutunya di sekeliling posisi silang dunia, dengan menjadikan Indonesia sebagai target strategis. Oleh karena itu, dalam menghadapi pembangunan geopolitik dan geostrategis di kawasan ini, Indonesia memerlukan *grand strategy* yang sinergis dan komprehensif mengenai kerangka diplomasi AS dan China, dan dalam waktu bersamaan tetap menjaga sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan lain adalah penanganan terorisme masa kini dan mendatang. Jaringan Al-Qaeda semakin merambah berbagai penjuru dunia, dengan tujuan utama menghapuskan pengaruh amerika dari Iraq dan Semenanjung Arab, menghapuskan pemerintah di kawasan tersebut, membasmi Israel dan pengaruh Yahudi dan Kristen, dan memperluas kekuasaan Islam di dunia. Untuk itu, perlu adanya perencanaan dan manajemen pertahanan yang tepat dalam menjawab tantangan ini, yang tercermin dalam politik luar negeri dan keamanan nasional.

Permasalahan batas-batas maritim dan pulau-pulau terluar Indonesia juga menjadi tantangan lain Indonesia dan ASEAN dalam lima tahun ke depan. Hingga saat ini terdapat 95 pulau dengan status pulau terdepan atau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, termasuk di dalamnya 12 pulau yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena dikhawatirkan akan diokupasi pihak asing, seperti pulau Miangas, Marampit, Sekatung, Rondo, Dana, Fanildo, dan Batek. Diharapkan adanya *multilayer defense system* (dengan medan pertahanan penyanggah) dalam menjawab tantangan ini, dimana pada pulau-pulau terluar tersebut, dan pada wilayah perbatasan.

Tantangan terakhir adalah optimalisasi keterlibatan daerah-daerah di Indonesia dalam Komunitas ASEAN paska tahun 2015. Keterlibatan pemerintah daerah dirasa penting mengingat terdapat banyak dasar hukum kerjasama daerah dengan luar negeri. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur mengenai aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hubungan luar negeri. Bahkan lebih khusus lagi, pemerintah Jawa Barat, misalnya, telah mengeluarkan

beberapa peraturan daerah seperti Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Diharapkan adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan Komunitas ASEAN lima tahun ke depan, khususnya kepentingan Indonesia di ASEAN.

Yanyan Mochamad Yani

Dilahirkan di Bandung, pada tanggal 5 Oktober 1966. Jenjang Strata 1 (Drs) diraih dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (1990). Penulis meraih gelar Strata 2, MA in International Relations (MAIR) dari Flinders University, Australia (2000) melalui beasiswa "Australian Development Scholarship", memperoleh gelar Strata 3, Ph.D in International Relations dari Auckland University, New Zealand (2004) melalui beasiswa "New Zealand Official Development Assistance (NZODA) Study Awards".



Yanyan adalah guru besar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, juga pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana UNPAD, dan Dosen Luar Biasa di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan, Bandung. Berbagai tulisan artikel dan makalah tentang Hubungan Internasional telah dipublikasikan di berbagai media cetak nasional maupun internasional.

Dimensi Maritim Dalam Isu Ketidakamanan Energi Tiongkok Di Asia Timur

Uni W. Sagena

Universitas Mulawarman

unisku@yahoo.com

Abstract

The issue of energy insecurity for China is one of the current issues in its international relations studies. This issue began to emerge when the country was originally known very rich in energy is gradually losing its energy security status, causing a variety of regional even global implications. China then suffered dependence on energy imports from abroad (oil and gas) that makes China face a variety of threats, whether the traditional or even non-traditional. One of the main threat is the increased risk and a threat to China's maritime security posed by its dependence on energy trade and transport through the sea lane of East Asia. China threat perception arises both from the state and non-state actors that get it involved tension or conflict with other countries in the region. This article uses the geo-strategic approach with a qualitative analysis method to explore the region's maritime dimension in energy issues of China since the post-Cold War era until now. This article argues that: 1) the main character of China's energy insecurity in East Asia is related to the maritime dimension; 2) China's energy insecurity makes the country actively and aggressively seek the new energy sources and suppliers, including in the dangerous maritime and conflict-prone zone; 3) threats to maritime dimension influence the country to change the energy search strategy by avoiding energy maritime route in East Asia and find alternative pathways for the safer transportation. This article is useful to understand the changing behavior of the countries that want to pursue energy security and to understand maritime constellation in a region based on the energy issue.

Kata Kunci

maritime, energy insecurity, China, East Asia

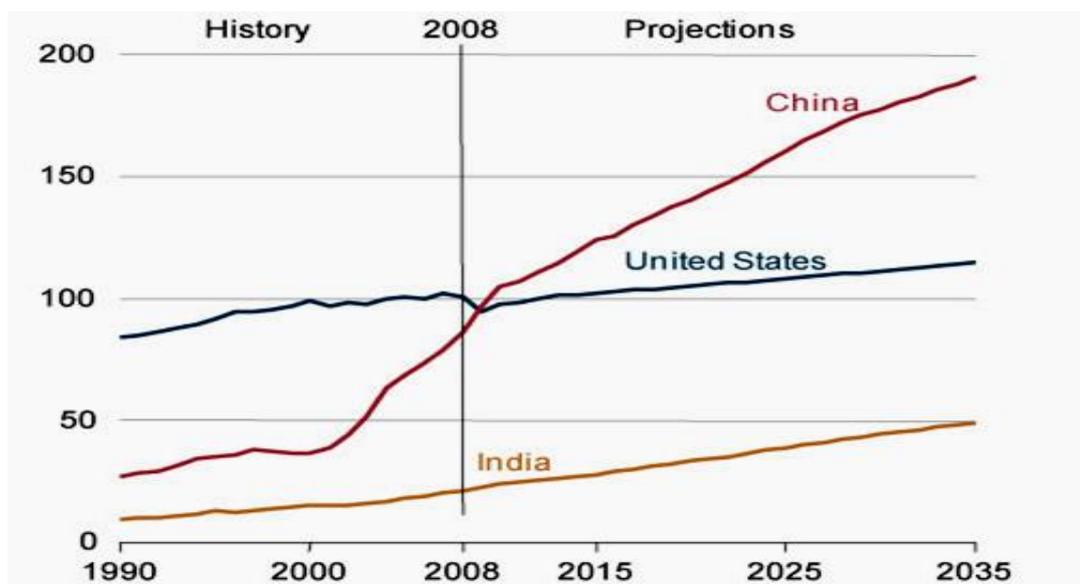
Latar Belakang

Tiongkok merupakan negara yang dikenal sangat besar, baik dari segi wilayah dan kepadatan penduduk yang sedang gencar melakukan modernisasi di berbagai sektor. Negara raksasa ini sedang mengalami periode industrialisasi besar-besaran sehingga berpengaruh pada permintaan dan konsumsi energi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Pada awalnya, Tiongkok adalah negara yang sangat kaya energi, namun kemudian terjadi pengurangan produksi sehingga terjadi kesenjangan antara *demand* dan *supply* energy dalam negeri.

Lambat laun, Tiongkok kehilangan statusnya sebagai negara produsen dan eksportir bahan bakar bumi (minyak dan gas) yang berakibat pada munculnya situasi ketidakamanan energi (*energy insecurity*) negara tersebut. Selanjutnya, Tiongkok mengalami ketergantungan impor bahan bakar fosil dari negara-negara produsen (awalnya negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara) yang dikenal kaya energi. Sejak tahun 2003, impor minyak Tiongkok sudah mendahului Jepang. Tiongkok bahkan telah menjadi konsumen minyak terbesar kedua di belakang Amerika Serikat serta menjadi antara lima negara importir minyak terbesar dunia (Mikkal E. Herberg 2004: 348).

Banyak prediksi internasional mengenai masa depan permintaan minyak Tiongkok yang diyakini besar kemungkinannya akan mendahului posisi Amerika Serikat sebagai negara pengguna energi terbesar di dunia seperti dalam diagram diagram 1 berikut ini:

Gambar 1. Perbandingan Kebutuhan Energi Cina, Amerika Serikat dan India



Sumber: www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm

Tren peningkatan kebutuhan energi yang drastis tersebut berimplikasi secara internal dan eksternal. Secara eksternal, Tiongkok memasuki babak-babak baru luar negerinya yang dikenal dengan "*go-out strategy*" dalam usahanya mengejar sumber-sumber bahan bakar fosil di berbagai kawasan demi mengejar keamanan energinya. Babak-babak baru tersebut penuh risiko kemudian mempengaruhi hubungan internasionalnya di berbagai kawasan, terutama di Asia Timur. Asia Timur yang dimaksudkan dalam artikel ini terdiri dari dua sub-region, Asia Timur Laut (tempat Tiongkok berada) dan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok.

Faktor energi ini yang diyakini semakin menambah dan memperparah hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya di Asia Timur yang memang sudah memiliki sejarah konflik yang panjang, yang cukup serius dan berliku terkait masalah kedaulatan, sejarah dan perbatasan. Namun, dengan munculnya isu ketidakamanan energi Tiongkok tersebut, membuat pola hubungan Tiongkok di kawasan ini semakin menyita perhatian dunia dan menimbulkan problematika serta dilema tertentu. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai risiko atau "*probability of unwanted events*" dalam konteks keamanan energi menurut perspektif Tiongkok sejak era pasca Perang Dingin sampai masa sekarang. Berbagai hasil studi literatur mengungkapkan situasi Tiongkok belakangan ini teramat khawatir dengan berbagai risiko energi yang cenderung rawan, terutama karena letak geografisnya yang memiliki wilayah dataran yang sangat luas dan garis pantai yang cukup panjang serta berbatasan langsung dengan berbagai negara, baik darat maupun laut.

Karena itu, penulis menganggap perlu dan penting untuk mengkaji risiko-risiko tersebut bagi memahami perilaku kontemporer Tiongkok sebagai negara yang mengalami ketergantungan terhadap pasokan minyak dan gas dari area-area yang penuh konflik dan kurang aman sehingga menambah perspektif ancaman Tiongkok. Alasan kedua adalah isu keamanan energi bagi Tiongkok baru belakangan ini saja menguat dalam kepentingan nasionalnya yang awalnya kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah komunis Tiongkok. Konstalasi dan eskalasi keamanan di Asia Timur semakin meningkatkan perhatian pemerintahnya terhadap isu energinya. Alasan ketiga adalah isu energi inilah yang mempengaruhi perubahan sikap negara Tiongkok dan mengubah fokusnya dalam memandang geopolitiknya. Yang awalnya menitikberatkan pertahanan dan keamanan darat menjadi lebih memperhatikan keamanan dan pertahanan maritimnya. Risiko seperti ini bersifat geopolitik yaitu faktor geografis sebagai pendekatan untuk menganalisis rencana politik, diplomasi, maupun pertimbangan militer suatu negara dalam sebuah negara

atau kawasan. Dengan kata lain, pertimbangan keamanan dan strategi energi Tiongkok di Asia Timur ini didasari oleh keadaan geografis Tiongkok dan kondisi kawasan Asia Timur yang penuh risiko dan ancaman keamanan dengan dimensi maritim yang kuat. Terakhir, sikap agresif Tiongkok memoderenkan armada maritimnya adalah juga salah satu faktor yang memunculkan teori yang cukup populer yaitu "*China`s threat theory*".

Untuk mengkaji hal tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung data-data kuantitatif dalam mengeksplorasi dimensi maritim yang dimaksudkan dalam isu keamanan energi Tiongkok pasca Perang Dingin hingga sekarang. Adapun struktur artikel ini adalah latar belakang yang berisi gambaran mengenai kondisi ketidakamanan energi Tiongkok dan kondisi umum Asia Timur. Bagian kedua adalah permasalahan yang akan diangkat untuk selanjutnya dieksplorasi lebih jauh dalam bagian analisis. Bagian ketiga adalah kerangka konseptual mengenai keamanan energi yang dilaborasi dengan konsep keamanan maritim sebagai acuan kajian ini. Dilanjutkan dengan bagian keempat berisi temuan-temuan mengenai jenis-jenis resiko keamanan energi di Asia Timur yang berciri dan berdimensi maritim. Bagian kelima adalah analisis mengenai bagaimana karakter dan dimensi maritim Asia Timur tersebut berpengaruh secara tradisional, non-tradisional, dan secara struktural. Secara **tradisional** yaitu mempengaruhi eskalasi dan konstalasi hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya yang diwarnai dengan berbagai risiko bersifat tradisional (berupa potensi konflik energi antara Tiongkok dengan negara-negara tetangganya di perbatasan maritime yang kaya energi) juga secara **non-tradisional** berupa bahaya dan gangguan SLOCs Asia Timur. Selain itu juga akan dianalisis bagaimana faktor **struktur** energi regional di Asia Timur yang berbagi masalah keamanan energi dengan Tiongkok sebagai pemasok energi utama bagi pasar dunia, yang juga mengalami kemunduran seperti Tiongkok sehingga melemahkan posisi negara-negara pemasok di wilayah ini. Bagian terakhir adalah kesimpulan yang berisi rumusan dan saran untuk penelitian yang lebih lanjut.

Permasalahan

Setelah menjelaskan kondisi ketidakamanan energi Tiongkok dan posisinya di Asia Timur, hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah bagaimana Tiongkok memandang situasi maritim di Asia Timur dalam konteks keamanan energinya. Dengan kata lain, bagaimana karakter maritim yang ada di kawasan Asia Timur ini menambah perspektif ketidakamanan energi Tiongkok sehingga menimbulkan berbagai pertimbangan keamanan dan strategi baru Tiongkok di

sektor maritimnya. Adapun asumsi utama artikel ini adalah: *pertama*, Asia Timur merupakan kawasan berdimensi maritime yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah Komunis Tiongkok karena merupakan kawasan paling rentan risiko dan memiliki tingkat ancaman yang lebih luas dan kritis, baik secara tradisional maupun non-tradisional. *Kedua*, pasokan dan pengiriman utama energi Tiongkok yang diimpor dari Timur Tengah melalui jalur laut di kawasan ini, namun sayangnya, Tiongkok kurang memiliki kontrol (*less control*) bagi memastikan kelancaran pasokan dan penghantarannya di kawasan ini dari berbagai gangguan, ancaman bahaya sepanjang aliran dan penghantarannya.

Kerangka Konsep

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan konsep keamanan energi sebagai bagian keamanan nasional yang akan dielaborasi dengan konsep keamanan maritim.

Konsep Keamanan Energi

Dasar konsep keamanan energi sebenarnya terbentuk dari konsep energi (*energy*) dan keamanan (*security*). Masuknya isu energi dalam penelitian keamanan melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*securitization*), yaitu proses pengidentifikasian isu tertentu apakah politik maupun selain politik yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Sekuritisasi dapat juga dilihat sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, 1998: 23). Istilah sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh Ole Waever (1995) tentang bagaimana sebuah isu ancaman tertentu (*threats*) diubah oleh aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), menjadi masalah keamanan bagi objek rujukannya (*referent object*). Sekuritisasi melampaui bidang politisasi yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer atas nama keamanan yang sering dilakukan oleh para elit politik secara khusus atau terbatas (Ole Waever 1995: 57).

Hubungan erat antara energi, politik, dan keamanan berikutnya menjadi perhatian ramai. Penelitian beberapa ahli internasional, diantaranya Kevin Rosner (2010), Phillip E. Cornell (2009), Haider A. Khan (2007), John R. McCaskill (2007), dan Williamson Murray (2002) mengungkap hubungan antara energi, keamanan nasional dan juga kekuasaan negara. Ketiga- tiga elemen inilah menurut beberapa ahli tersebut semestinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan keamanan nasional. Nilai penting energi bagi suatu negara harus dilihat dalam perspektif kekuasaan pada tingkat nasional, karena energi sangat mempengaruhi stabilitas negara itu sendiri.

Menurut Kevin Rosner (2010), energi eksis dalam bentuk apapun yang diperlukan oleh negara baik bagi kebutuhan transportasi, militer, maupun ketika terjadi konflik atau perang. Justru itu, tantangan penting bagi seorang pemimpin negara saat ini adalah berusaha memastikan keamanan energi di negara yang dikelolanya dengan jalan memperoleh sumber-sumber energi yang semakin menurun. Adapun konsep aman secara sederhana didefinisikan sebagai kondisi yang bebas dari segala bentuk risiko atau *unwanted events* seperti bahaya, kecemasan, ancaman, dan ketakutan dari sektor energi. Konsep ini berlaku luas dan dapat diaplikasikan baik bagi pihak konsumen, produsen, importir, maupun eksportir energi (Sagena dan Mustamin, 2016:4).

Konsep Keamanan Maritim

Sebagaimana keamanan energi, keamanan maritim juga merupakan salah satu istilah baru dalam ilmu hubungan internasional. Ia merupakan cabang baru dari isu-isu keamanan. Antara keduanya memiliki kaitan erat bahkan saling tergantung (*interdependent*) dan sulit dipisahkan (Keyuan Zou (2009:136). Tanpa adanya keamanan maritim, maka keamanan energi tidak dapat dipertahankan dalam realitasnya. Berbagai risiko timbul karena kaitan antara energi, keamanan negara, dan lingkungan keamanan maritim dalam konteks Asia Pasifik menimbulkan istilah "wicked problems" – yaitu istilah yang merujuk pada kompleksitas masalah maritim yang timbul di kawasan ini, seperti dijelaskan oleh Sam Bateman (2011:2) "... *they are pressing and highly complex issues for policy formulation that involve many causal factors and high levels of disagreement about the nature of a problem and the best way to handle it*".

Kompleksnya isu dan solusi terhadap masalah keamanan maritim ini berpengaruh pada belum ada kesepakatan internasional atau definisi yang baku tentang keamanan maritim (*maritime security*). Ada yang melibatkan ancaman keamanan non-tradisional dalam definisi mereka (bagi negara kepulauan seperti Indonesia, Philipina dan Jepang). Namun, ada juga sebagian negara yang tidak nyaman jika dalam konsep keamanan maritim memasukkan isu ancaman lingkungan laut atau *illegal fishing* (bagi negara zona maritim kecil seperti Thailand, Korea Selatan, dan Singapura). Ini berarti, dalam konsep keamanan maritim pun terdapat perbedaan persepsi antar aktor dalam mendefinisikannya. Hal ini memunculkan risiko perbedaan pendapat tentang indikator keamanannya sehingga berpotensi melahirkan konflik.

Di sisi lain, konsep ini juga membuka ruang bagi aktor-aktor internasional untuk melahirkan konsensus bersama dalam mendefinisikan kesamaan pun perbedaan pendapat yang diperlukan. Seperti yang diusulkan oleh Christian

Bueger (2015) dalam membangun kerangka berpikir yang meliputi: 1) keamanan maritim dapat dipahami dalam matriks hubungannya dengan konsep lain, seperti keamanan laut, *Seapower*, ekonomi biru dan ketahanan; 2) kerangka sekuritisasi memungkinkan untuk mempelajari bagaimana ancaman maritim yang dibuat dengan klaim politik berbeda diperlukan untuk mengungkap kepentingan politik dan ideologi yang berbeda; 3) teori praktek keamanan memungkinkan studi tentang aktor apa yang sebenarnya dilakukan ketika mereka mengklaim untuk meningkatkan keamanan maritim.

Bueger membangun matriks konsep keamanan maritim ke dalam empat bagian yang saling berhubungan, yaitu yang berkaitan dengan *marine environment (marine safety)*, *economic development (blue economy)*, *national security (sea power)*, *human security (resilience)*. Dalam konteks kajian artikel ini, hubungan keamanan maritim dengan keamanan energi Tiongkok terletak pada matriks mengenai *marine safety* (seperti kecelakaan kapal-kapal di laut, gangguan maritime) serta keamanan nasionalnya (seperti *arms proliferation* dan *inter-state dispute*). Kedua hal ini merupakan prioritas penting dalam pertimbangan strategis Tiongkok untuk membangun *sea power* untuk melindungi keamanan energinya di wilayah maritim yang rawan seperti konflik dan berbahaya serta untuk melindungi pengirimannya yang diangkut dengan kapal-kapal tanker raksasa melalui jalur laut internasional.

Untuk itu, hubungan antara keduanya akan terlihat dalam bagaimana Tiongkok memandang maritim Asia Timur dalam konteks keamanan energinya.

Temuan-Temuan

Artikel ini menemukan bahwa sumber risiko yang diidentifikasi dalam artikel ini adalah risiko yang mengandung dimensi politik-militer, baik dari negara (*state*) maupun (*non-state*). Risiko berdimensi politik-militer menurut pakar energi dari Tiongkok, Chen Shaofeng (2009: 11), berarti "*the risk of loss of investment returns or the disruption of trade resulting from political changes or instability in a country*". Sumber risiko yang ditimbulkan oleh aktor negara (*state actors*) maupun aktor bukan negara (*non-state actors*) dikhawatirkan akan menargetkan gangguan dan ancaman selama proses menyediakan pasokan, fasilitas-fasilitasnya produksi, sampai proses transportasi energi ke daratan Tiongkok. Dalam konteks keamanan energi, keadaan geografisnya itu membuat Tiongkok cenderung menghadapi berbagai risiko keamanan yang mengandung bahaya tersembunyi karena kemunculannya yang sering kali tidak disadari dan sulit diantisipasi, baik dari hulu ke hilir - yaitu: (1) risiko gangguan politik dan militer di beberapa wilayah pemasok utama energinya (faktor hilir); (2) risiko kecelakaan dan gangguan yang dapat merusak prasarana dan

fasilitas produksi energinya (faktor hilir); serta (3) risiko keamanan di jalur pengiriman atau pegangkutan energi hingga sampai ke konsumen dalam negerinya (faktor hulu). Risiko-risiko tersebut dilihat sebagai potensi ancaman serius bagi keamanan pasokan dan pengiriman energi Tiongkok dari luar negeri.

Temuan lainnya adalah dalam usaha pencarian pembekal dan jalur pengiriman energinya, Tiongkok menghadapi dua risiko secara simultan dan dari semua arah. *Pertama* adalah risiko politik yang tinggi (*high political risks*) yang melibatkan kawasan dan negara-negara pemasok energi Tiongkok yang situasinya kurang stabil karena adanya konflik internal. Contohnya adalah kawasan Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Asia Barat (Timur Tengah) dan negara-negara Afrika yang dapat membahayakan keselamatan aktivitas energi Tiongkok. *Kedua* adalah risiko politik yang rendah (*low political risks*), contohnya adalah negara-negara pemasok energi yang berasal dari daerah wilayah Asia Tengah. Meskipun status negara pemasok energi Tiongkok ini masih baru dan memiliki masalah internal, namun hal ini cenderung masih dapat dikontrol oleh pemerintah Tiongkok karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan darat Tiongkok di sebelah barat. Persepsi ancaman keamanan energi Tiongkok tidak terlepas dari kondisi-kondisi *high political risks* dan *low political risks* tersebut.

Singkatnya, artikel ini menemukan beberapa hal yang menunjukkan karakter dan kentalnya dimensi maritim dalam perspektif ketidakamanan energi Tiongkok yang secara serius menunjukkan problem besar bagi pemerintah, yang kami petakan secara sederhana berikut ini: 1) secara tradisional, persepsi ancaman Tiongkok dari negara-negara tetangganya yang berbatasan langsung secara maritim dengannya dan memiliki sengketa maritim sejak lama. Sengketa antar negara ini sangat berpotensi mengakibatkan konflik maritim di kawasan *overlapping* area yang kaya energi seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Timur; 2) secara non-tradisional, persepsi ancaman Tiongkok juga berasal dari non-state actors yaitu pelaku-pelaku kejahatan maritim seperti perompak laut (*piracy*), *sea robbery*, potensi terorisme maritime.

Analisis

Alasan kajian dimulai dari karakter wilayah Asia Timur ini yaitu karena risiko-risiko keamanan energi terbesar yang timbul dari kasus Tiongkok berasal dari letak geografisnya yang cukup rentan di bagian pesisir laut. Selain itu, wilayah maritim Asia Timur Laut adalah halaman depan atau "pintu masuk" ke Tiongkok melalui SLOCs Asia Tenggara. Selain itu, di wilayah Tiongkok juga menghadapi persaingan-persaingan energi dengan negara-negara tetangganya

seperti Jepang, India, Korea Selatan yang turut tergantung pada pasokan energi global, khususnya minyak dan gas alam. Cina harus berbagi dengan negara-negara industri ini yang turut memiliki kebutuhan dan permintaan energi yang begitu tinggi.

Selain itu, kehadiran angkatan laut Amerika Serikat sebagai pengawal utama yang menguasai arus lalu lintas dan keselamatan Sea Lanes of Communications (SLOCs) wilayah yang merupakan negara saingan dan lawan tradisional Tiongkok. Singkatnya, wilayah ini adalah daerah yang kurang aman (*less secure*) bagi Cina memperoleh persediaan tenaganya bahkan dapat memicu sumber konflik baru di perbatasan maritim yang kaya energi dan dapat memicu gesekan di sepanjang SLOCs kawasan Asia Timur ini. Selain itu, SLOCs di Asia Tenggara adalah lokasi *hot spot* utama terjadinya kecelakaan laut yang melibatkan kapal-kapal tanker minyak dunia sehingga minyak yang tumpah ke lautan yang merusak kehidupan alam laut seperti data yang ditemukan oleh organisasi WWF.

Dengan arti lain, kaitan keamanan energi dan maritim di Asia Timur ini terlihat dari daerah-daerah maritim yang tidak aman bagi Tiongkok karena rentan dengan berbagai risiko tabrakan energi yang melibatkan tetangga Tiongkok sehingga dikhawatirkan menjadi sumber konflik baru yang berdimensi energi. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Laut Cina Timur (East China Sea), Laut Cina Selatan (South China Sea), dan Selat Malaka (Malacca Strait). Area-area ini adalah penyumbang terbesar kekhawatiran Tiongkok bahkan regional seperti faktor geo-politik dan strategis di kawasan ini sebagai jalur utama pelayaran kapal-kapal minyak Cina seperti dalam gambar 2.

Singkatnya, karakter keamanan energi Tiongkok yang bertautan dengan keamanan maritim di Asia Timur seperti terlihat pada peta di atas, sangat menantang Cina dan dikhawatirkan dapat menjadi sumber konflik baru di wilayah ini. Berikut dibahas peristiwa atau situasi-situasi tertentu yang melibatkan kepentingan dan keamanan energi Tiongkok di wilayah tersebut yang cukup memberi argumen mengapa daerah tersebut sangat bernilai dan strategis bagi Tiongkok sehingga negara tersebut sangat peduli masalah energi di daerah ini.

Gambar 2. Peta Rute Maritim Kapal Minyak di Asia Timur



Sumber: www.energy-daily.com

Potensi Konflik Energi Tiongkok-Jepang di Laut Cina Timur

Laut Cina Timur (East China Sea) adalah area paling strategis bagi Tiongkok, namun di situ pulalah ada potensi konflik energi yaitu perselisihan energi maritim dengan Jepang. Ketegangan kedua negara ini senantiasa mendapat perhatian banyak utamanya perselisihan mereka dekat perbatasan maritim yang kaya minyak dan gas.

Dimulai sejak dua dekade terakhir, Tiongkok telah mengalihkan pencarian sumber persediaan energinya dari sumur-sumur minyak di daratan (*onshore*) ke wilayah pesisir luar (*offshore*) di dekat Laut Cina Timur. Sumur-sumur minyak dan gas di daratan yang berusia antara 40 sampai 50 tahun berada di daerah di Daqing, Jilin, Shengli yang dekat dengan perbatasan Tiongkok-Rusia dan Korea - namun lading minyak ini telah anjlok produksinya. Sumur-sumur yang berusia lebih muda pula adalah di Tarim Basin, wilayah Xianjiang, yang dekat perbatasan Tiongkok-negara Asia Tengah. Sementara sumur-sumur yang terbaru ditemukan dalam 10 tahun terakhir ini adalah di daerah pesisir Laut Cina Timur (dan Laut Cina Selatan). Area-area tersebut dapat dilihat dalam peta berikut ini:

Gambar 3. Lokasi Sumur Minyak China di Wilayah Pesisir Luar Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan



Sumber: Cina OGP (1999 Vol. 2)

Yang paling menarik minat dan perhatian pemerintah Tiongkok adalah persediaan dan pasokan minyak dan gas yang terpercaya terletak di wilayah maritim Kepulauan Senkaku (Jepang), yang disebut juga Diaoyudao (oleh Tiongkok) atau Diaoyutai (oleh Taiwan). Perbedaan nama atau istilah tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi hak milik kepulauan di wilayah perbatasan negara-negara Asia Timur Laut tersebut. Kasus perebutan sumber energi di perbatasan maritim itu membuktikan apa yang dikenal sebagai "*energy nationalism*" karena ia telah bercampur dengan masalah kedaulatan negara.

Secara geografis, Kepulauan Diaoyutai tersebut terletak 120 mil sebelah timur laut Taiwan, 200 mil sebelah timur Tiongkok Daratan, dan 200 mil dari bagian tenggara Okinawa, Jepang (Reinhard Drifte 2003: 49). Kawasan ini diduga secara kuat memiliki sumber hidrokarbon, perikanan dan deposit logam dasar laut (*sea-floor deposits of metals*) dan cadangan minyak yang signifikan. Kandungan gas alam sebesar 200 miliar meter kubik yang terpancang di Laut Cina Timur membuat area tersebut diperebutkan sampai berpotensi menjadi "*sea of confrontation*" (Sean Curtin 2005).

Konflik perbatasan di daerah tersebutnya sebenarnya sudah lama ketika Jepang memulai penerokaannya mencahari sumber-sumber minyak dan gas di sana. Tiongkok pula pernah protes keras terhadap perjanjian bilateral Jepang-Korea Selatan yang disebut dengan "The Agreement concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent". Perjanjian ini ditandatangani pada Januari 1974 tentang eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Timur.

Namun, tabrakan laut ini lebih sering terjadi karena belakangan ini Tiongkok makin agresif mengeksplorasi dan membangun fasilitas pengeboran sumur-sumur minyak dan gas yang dekat dengan wilayah perbatasan maritim yang disengketakan tersebut. Tiongkok mengklaim wilayah laut itu sebagai bagian dalam EEZ (Exclusive Economic Zone) Tiongkok sejak ia menjadi bagian dari pembaharuan alam Tiongkok di landasan kontinennya (continental shelf). Kegiatan dan sikap agresif Tiongkok di area tersebut di antaranya adalah:

Pertama, masuknya kapal-kapal penelitian (*research vessels*) Tiongkok, kapal ikan dan kapal militer angkatan laut Tiongkok (PLAN) beberapa kali ke dalam zona EEZ yang turut diklaim Jepang. Namun, Tiongkok dan Jepang tidak setuju mengenai garis pembatasan (*demarcation*) atas beberapa kawasan eksplorasi gas alam yang tersebar di dasar laut tersebut. *Kedua*, Tiongkok telah pula melakukan langkah-langkah pengeboran (*drilling*) minyak dan gas di wilayah perbatasan sejak awal tahun 1980-an dan telah membuktikan niatnya itu untuk mengembangkannya secara mandiri sepanjang kemampuan teknologinya memungkinkannya melakukan itu (Reinhard Drifte 2003: 57-59). Salah satu insiden pernah terjadi di Chuanxiao Gas Fields, yang terletak dekat garis perbatasan Cina. Pada bulan April 2005, terjadi peristiwa pemicu konflik di wilayah tersebut ketika perusahaan minyak Tiongkok, CNOOC, mengumumkan akan memulai kegiatannya di lapangan gas tersebut. Tahun itu juga, Tiongkok telah mengerahkan kapal-kapal perangnya (*warships*) memantau dekat ladang gas tersebut sehingga menimbulkan protes dari rakyat Jepang karena berjarak hanya lima kilometer dari garis perbatasan yang diklaim Jepang. Meskipun Tiongkok akhirnya menawarkan eksplorasi bersama di area tersebut namun Jepang menolak menerima dan meminta Tiongkok untuk membekukan rencananya untuk memompa gas di sana.

Penolakan, ketegangan, dan kemarahan Jepang tersebut sebab Jepang pun mengakui wilayah tersebut adalah hak miliknya. Bagi Jepang, wilayah laut tersebut adalah EEZ miliknya berdasarkan letak medan tersebut berada pada 200 mil (370 km) dari pantai Jepang. Garis perbatasan yang tumpah tindih tersebut dapat dilihat pada gambar 4.

Sebagai balasannya, pemerintah Jepang juga mulai memberikan hak pengeboran (*drilling rights*) kepada perusahaannya, Teikoku Oil Corporation, di daerah-daerah bencana (B.Kong 2005:51). Ketegangan tetap muncul setelah dua putaran pembicaraan bilateral gagal menyelesaikan sengketa tersebut. Saling bantah membantah seperti ini terus berlanjut dan semakin membuktikan persaingan kedua negara akan sumber-sumber energi di sekitar wilayah maritim tersebut.

Gambar 4. Lokasi Ladang Gas Tiongkok di perbatasan yang tumpang tindih di Laut Cina Timur



Sumber: www.rigzone.com

Perseteruan energi Tiongkok-Jepang juga dekat dengan daerah perairan lainnya yang cukup penting, yaitu Selat Taiwan (Taiwan Strait) yang letaknya dekat Laut Cina Timur. Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian kawasan yang mencoba untuk memisahkan diri. Justru itu, Tiongkok menganggap Jepang dan Amerika Serikat turut campur membantu Taiwan memisahkan diri secara permanen dari Tiongkok dengan memberi bantuan militer seperti kapal-kapal perang dan pesawat tempur. Jepang sendiri berharap agar Taiwan dan Tiongkok terpisah sebab jika tidak, Jepang mengkhawatirkan Tiongkok menjadikan Taiwan sebagai pangkalan sub-marine yang dapat memperluas kontrol maritimnya di Laut Cina Timur. Artinya, jalur Selat Taiwan ini juga salah satu isu yang menambah risiko perselisihan Tiongkok-Jepang di Laut China Timur.

Aktivitas energi Tiongkok di perbatasan itu direspon serius oleh Jepang. Media konservatif Jepang, misalnya, memperlihatkan persepsinya terhadap aktivitas energi Tiongkok. Seperti koran Jepang, Yaori Shimbung (18 April

2005), mengistilahkan wilayah sengketa maritim tersebut sebagai *sea of confrontation* atau *sea of conflict*. Malahan karena lonjakan peningkatan penggunaan energi Tiongkok, banyak kalangan di Jepang yang menjuluki Tiongkok sebagai negara " *the resource-gorging country* ". Dalam kasus energi, Jepang lebih berpengalaman menghadapi krisis dan tidak seagresif Tiongkok sebab masalah kekurangan energi bukanlah isu yang baru bagi Jepang. Rakyat dan pemerintah telah terbiasa dengan kondisi alam yang sangat miskin sumber-sumber energi penting, terutama minyak dan gas. Padahal negara itu sangat membutuhkannya untuk menjalankan roda industri dan pembangunan ekonominya yang sangat cepat dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Jepang tidak memiliki satupun sumur minyak utama (*oil fields*), karena itu ia sangat tergantung kepada berbagai sumber eksternal untuk memenuhi seluruh kebutuhan minyaknya (Ken Koyama 1997)

Beberapa kali protes rakyat Jepang ditujukan kepada aktivitas energi Tiongkok, mereka sangat serius memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi di area tersebut sehingga sering menimbulkan perasaan anti-Tiongkok di Jepang maupun sebaliknya, anti-Jepang di Tiongkok. Artinya, perselisihan energi yang sengit tersebut telah menimbulkan sentimen nasionalisme di kalangan rakyatnya dan menjadi hambatan politik pemerintah. Justru itu muncul istilah yang sering digunakan para ahli tentang hal ini (William T. Tow (2007: 163, Herberg 2004, Herberg 2005) yaitu "*energy nationalism*" - yaitu unsur keamanan energi tumpang tindih dengan faktor nasionalisme dan kedaulatan di wilayah perbatasan yang disengketakan antara negara di wilayah ini.

Potensi Konflik Energi China-ASEAN di Laut Cina Selatan

Daerah yang turut menyediakan sumber-sumber pasokan energi bagi Tiongkok tetapi kurang aman keadaannya adalah kawasan Laut Cina Selatan (South China Sea), terutama di Kepulauan Sparty (Spartly Islands). Area ini juga memiliki isu klaim tumpang tindih (*overlapping claims*) antara Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara ASEAN yaitu Brunai Darussalam, Malaysia, Philippines, dan Vietnam. Meskipun ada hukum laut UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) namun ianya memiliki problem lain, seperti dikatakan oleh Bateman (2011: 4):

"... The roots causes of which lie in basic conflicts of interest between countries on Law of the Sea issues, and the" built-in "ambiguity of UNCLOS in several of its key regimes. Also, disagreement can arise over what constitutes customary practice with particular regimes. This is evident, for example, with the use of territorial sea straight baselines by regional countries. "

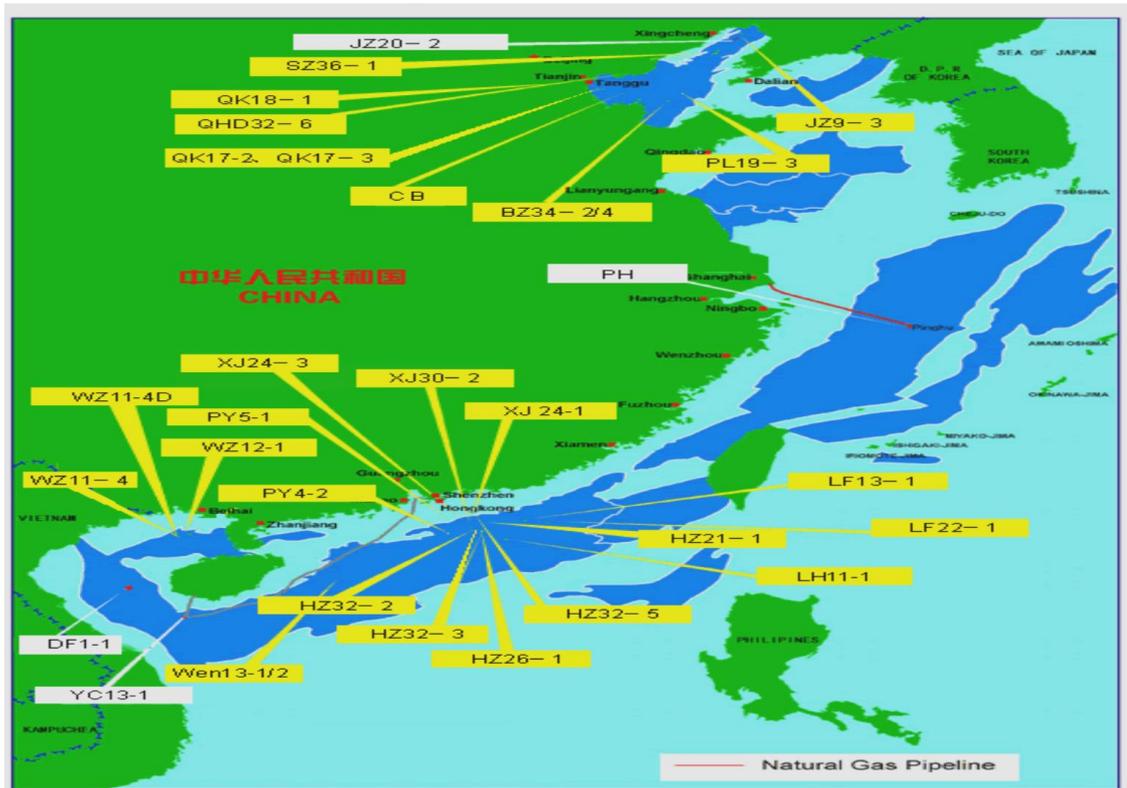
Dua kali kasus tabrakan bersenjata pernah terjadi di kepulauan Laut China Selatan, yaitu tahun 1973 dan 1988 antara Tiongkok dengan Vietnam. Bahkan sejak dekade 1990-an, ketegangan Tiongkok dan tetangganya semakin sering terjadi. Pertama kalinya Tiongkok menyajikan tuntutan atas wilayah sengketa dengan tetangga-tetangganya dimulai sejak awal tahun 1995, hanya beberapa bulan setelah ia berubah menjadi negara pengimpor minyak (Paul French dan Sam Chambers (2010: 74). Karena itu, Tiongkok makin agresif dan terus menjadi pemain kunci di Laut Cina Selatan dan mulai terlibat perselisihan dengan pemain utama lainnya, seperti Vietnam.

Kasus berikut terjadi tahun 1995, terjadi ketegangan antara Tiongkok-Phillippina atas area Mischief Reef yang banyak disoroti oleh media massa. Demikian pula dengan penangkapan pelaut dan kapal-kapal ikan sering terjadi dan mereka saling menyalahkan karena menginvasi wilayah sengketa tersebut. Juni 2002, Tiongkok melaksanakan latihan perang di Laut Cina Selatan lalu ditentang oleh Vietnam, namun Tiongkok berpendapat bahwa aktivitas mereka di lautan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir tahun 2010, Tiongkok terlibat perselisihan dengan Vietnam dan keterlibatan Amerika Serikat. Tak ada yang meragukan bahwa sengketa antara Tiongkok dengan negara-negara tersebut adalah karena kandungan energi yang berlimpah di daerah itu, sebab minyak dan gas diyakini sebagai faktor utama dalam sengketa di Kepulauan Sparty (Keyuan Zou 2009: 140).

Delapan sedimen sumur minyak (basin) ditemukan di wilayah Sparty yaitu sepanjang 410,000 kilometer persegi dan 260.000 kilometer persegi antaranya diklaim secara sepihak oleh Tiongkok dalam area *U-shape line*. Zou menyebutkan bahwa dalam delapan sedimen basin tersebut berisi 34.97 milyar ton persediaan minyak, termasuk yang telah ditemukan yaitu sebanyak 1.182 miliar ton minyak dan 8.000 miliar meter kubik gas alam. Masih banyak lagi jumlah hidrat gas (juga dikenal sebagai flammable ice) di Laut Cina Selatan. Kekayaan energi tersebut membuat Laut Cina Selatan sering disebut juga dengan julukan sebagai "*a second Persian Gulf*" (Keyuan Zhou 2009: 140).

Perusahaan-perusahaan nasional minyak dan gas Tiongkok sudah aktif dan agresif melakukan eksplorasi di daerah-daerah maritim dekat perairan Laut Cina Selatan. Produksi minyak di daerah ini lingkungan 2,5 juta barrels perhari dan telah meningkat secara berangsur-angsur beberapa tahun lampau tepat setelah Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam meningkatkan produksinya (Hongyi Lai 2009: 38).

Gambar 5. Lokasi Eksplorasi Perusahaan Energi Cina di Laut Cina Selatan

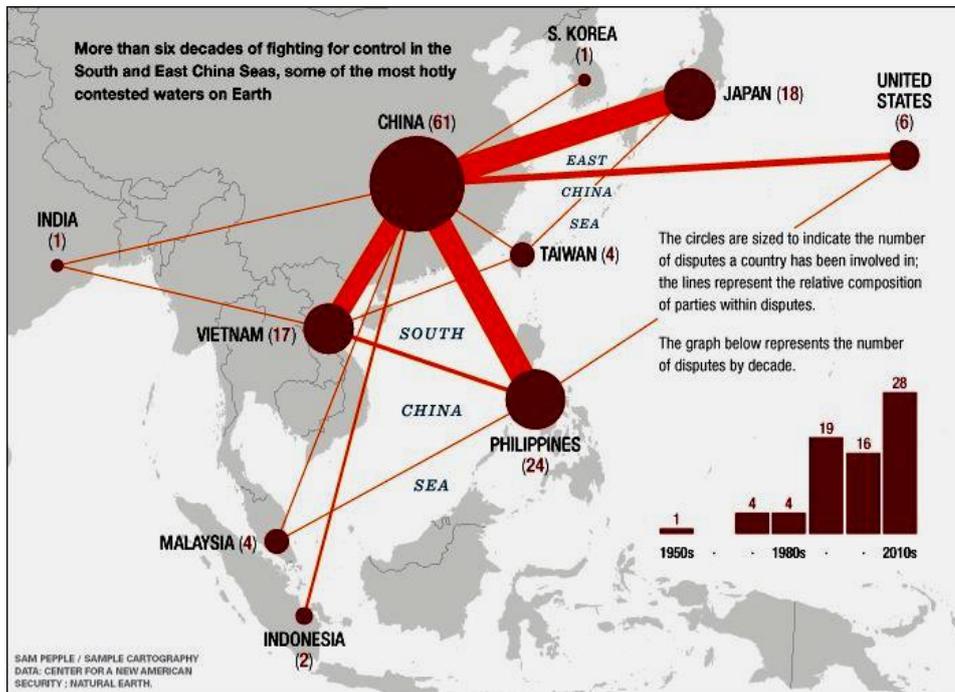


Sumber: CNOOC website (dalam B.Kong 2005: 36)

Akibat eksplorasi perusahaan-perusahaan energi Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan telah memperkeruh hubungannya dengan negara-negara ASEAN di daerah kepulauan Spratly (Spratly Islands), terutama dengan Vietnam, Philippines, Malaysia, dan Brunei. Situasi inilah yang dikuatiri dapat menimbulkan konflik energi, seperti dikatakan oleh Robert Manning (2000b: 86), "the logic of energy security is based on an interrelationship of resource scarcity and territorial dispute that leads to conflicts".

Jumlah sengketa Tiongkok dengan tetangga-tetangganya di Asia Timur menunjukkan peningkatan dari dekade 1950-an (1 sengketa), meningkat pada dekade 1980-an (4 sengketa), meningkat lagi dekade 2000-an (28 sengketa) (gambar 6). Sementara keterlibatan armada laut Amerika Serikat yang mengontrol SLOCs daerah ini menambah pemain di antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Demikian pula dengan keterlibatan India, Jepang yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat membuat pihak-pihak yang berkepentingan di area tersebut bertambah banyak. Jumlah sengketa dan jalinan antara pihak-pihak tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Jelas terlihat bahwa Tiongkok memiliki sengketa maritim terbanyak di Laut Cina Selatan dibandingkan negara-negara lainnya.

Gambar 6. Peta Konflik di Laut China Timur dan Selatan.



Sumber: <http://www.foreignaffairs.com>

Risiko Gangguan Maritim Non-State

Risiko lainnya, ketidakselamatan energi yang dihadapi Tiongkok tidak berhenti sampai masalah perselisihan energi di perbatasan yang dipersengketakan saja, melainkan terus menerus menjadi masalah pengiriman pasokan energi Tiongkok yang mayoritas dikirim dengan kapal-kapal tanker yang membawa pasokan minyak atau gas impor Tiongkok dari Timur Tengah dan Afrika melalui sandi SLOCs Asia Timur ini. Masalah baru pula dari isu pengiriman ini yaitu menjadi rawan menerima gangguan selama aliran pasokan tersebut dikirim dengan kapal-kapal tanki asing. Pembatasan dapat dikenakan oleh negara-negara Timur Tengah dan Afrika mayoritas dibawa berlayar melalui SLOCs dan beberapa choke points Selat Melaka yang berbahaya.

Pada masa kini, pelaku-pelaku kejahatan di laut didukung dengan senjata api yang modern dan kerap menggunakan kekerasan, serta menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan mereka bergerak dengan tanggap dan cepat. Perompakan dilakukan dengan cara mencuri isi kapal, mencuri kapal, membunuh awak kapal, menyandera dan menculik awak kapal untuk mendapatkan uang tebusan dari para pemilik kapal. Aksi-aksi ini dilakukan tidak hanya pada saat kapal melintas tetapi juga terhadap kapal yang

sedang berlabuh. Taktik yang mereka lakukan dengan cara menyerang kapal dengan naik ke dek kapal di malam hari pada saat awak kapal sedang lengah atau istirahat. Yang diserang bukan hanya kapal-kapal bermuatan kecil malah sasaran utama adalah kapal-kapal tanker yang memuat bahan-bahan energy vital seperti LNG, gas, dan minyak (lihat gambar 7). Modus demikianlah yang telah menimbulkan rasa teror terhadap para pemilik kapal baik maupun awak-awak kapal tersebut.

Gambar 7. Serangan terhadap Kapal-kapal Tanker



Pandangan Tiongkok mengenai posisi strategis Selat Malaka cukup signifikan. Paradigm baru keamanan Tiongkok melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Tiongkok mengalami kekhawatiran akan ancaman kelancaran arus *supply* dari negara-negara tersebut sehingga dapat mengganggu ketergantungan Tiongkok terhadap bekalannya mereka. Kapal-kapal tanker Tiongkok selalu melintasi Selat Malaka dalam perjalanan mereka membawa minyak dari Timur Tengah. Karena itu dalam kepentingan ekonomi Tiongkok, selat ini harus terjamin keamanannya dari segala ancaman yang bisa menghalanginya kelancaran bekalannya energi menuju daratan Tiongkok. Kekhawatiran ini menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok semakin memperkuat kekuatan maritimnya dengan memodernisasi angkatan lautnya (PLA Navy) untuk melindungi wilayah perairannya sendiri serta untuk menjamin kelancaran pelayaran kapal-kapal yang mengangkut keperluan energinya dari gangguan perompak dan dari pemanfaatan laut untuk tujuan kejahatan lainnya (Peter Howarth, 2006:46).

Selain itu, Cina juga menghadapi "Malacca Dilemma" - istilah ini dijelaskan Hu Jintao pada akhir tahun 2003 – dalam memutuskan strategi maritim mana yang tepat ditempuh oleh Cina menanggulangi kerawanan maritim di Selat Malaka tersebut dengan mempertimbangkan respon dan implikasinya terhadap negara-negara tetangga lainnya di Selat Malaka (Marc Lanteigne, 2008). Terdapat keinginan untuk menerapkan strategi unilateralisme untuk menjamin keamanan di Selat Malaka secara sendiri namun strategi demikian dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi keras dari negara-negara sekitar Selat Malaka.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal: *pertama*, perilaku Tiongkok yang semakin agresif meningkatkan kemampuan maritime dengan melakukan modernisasi angkatan lautnya (PLA-Navy) bukan hanya semata-mata menjaga kedaulatan maritim, melainkan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya membawa sendiri bekalannya dengan kapal-kapal tankernya sendiri (tidak ingin hanya menyewa saja dari negara lain); *kedua*, didasari keinginan kuat Tiongkok untuk mengamankan jalur laut yang rawan gangguan maritim dengan cara mengontrol sendiri kapal-kapal tanker miliknya dengan kapal-kapal perangnya sendiri; *ketiga*, motif ekonomi politik berada dibalik sikap agresifnya di lautan sekaligus memiliki motif militer untuk bersiap-siap jika keadaannya mengharuskannya untuk berperang demi mengamankan bekalannya energi dan rutennya; *keempat*, hasil yang dapat diperoleh Tiongkok dari memastikan keamanan energi (didukung kekuatan maritimnya) dapat meningkatkan statusnya sebagai negara superpower (economic power and sea power yang dikembangkan secara serentak); *kelima*, isu keamanan energi bagi Tiongkok berarti pula menjaga keamanan maritimnya. Dalam konteks Asia Timur dan bagi Tiongkok, keamanan maritim dan energi merupakan bagian yang tidak terpisahkan bahkan menjadi paradigm keamanan baru dalam pertimbangan strateginya. Energi dan maritim juga merupakan dua perkara penting yang menjembatani kepentingan tradisional Tiongkok dengan kepentingan non-tradisionalnya.

Dengan kata lain, isu keamanan energi bagi Tiongkok tidak hanya berkaitan dengan sumber-sumber energi semata-mata, melainkan juga terkait erat dengan masalah politik, kedaulatan negara, nasionalisme, dan keamanan maritim, ekonomi-politik, strategis militer, maupun menurut sejarah hubungan China dengan negara-negara ini. Ini adalah realitas betapa permasalahan energi China di Asia Timur terlampaui rumit dan telah tumpang tindih dengan dimensi-

dimensi lain sehingga menjadi isu penting yang patut diperhitungkan dalam pertimbangan keamanan China.

Referensi

- Bateman, Sam. 2011. Solving "wicked problems" of maritime security. Dalam *Contemporary Southeast Asia* 33(1): 1-28.
- Bouger, Christian. 2015. *What is maritime security?* Marine Policy, Volume 53, March 2015, Pages 159–164. Elsevier.
- Buzan, Barry, Waever, O. and de Wilde, J. 1998. *Security: a new framework for analysis*, Boulder, USA dan London: Lynne Rienner.
- Cornel, Phillip E. 2009. Energy security as national security: defining problems ahead of solutions. Thursday, 19 February 2009 15:12.
- Curtin, J Sean. 2005. *Sea of confrontation: Japan-China territorial and gas dispute intensifies*. <http://japanfocus.org>. [1 Desember 2009]. 10:12 pm.
- Drifte, Reinhard. 2003. *Japan's security relations with China since 1989: from balancing to bandwagoning?*. London: RoutledgeCurzon.
- Herberg, Mikal. 2011. *China's energy rise and the future of U.S.-China energy relations*. <http://newamerica.net/publications/policy>. [4 Mac 2012] 3:55 am
- Hongyi, Lai. 2009. Introduction: understanding and enhancing energy and maritime security in Asia. Dlm. Hongyi Lai (ed.). *Asia energy security: the maritime dimension*. New York: Palgrave Macmillan.
- Howarth, Peter. 2006. *China's Rising Sea Power The PLA Navy's Submarine Challenge*. London; Routledge.
- Ken, Koyama. 2003. Energy security in Northeast Asia. Paper dibentangkan dalam *international workshop on "cooperative measures in Northeast Asian petroleum sector: focusing on Asian premium issues*. September 6, 2003. The palace hotel, Seoul. www.ieej.com. [15 April 2009] 2:16 am.
- Khan, Haider A. 2007. *China's energy security with special reference to Japan*. <http://ssrn.com/abstract=990185>. [25 Ogos 2009] 11:00 pm.
- Kong, B. 2005. *An anatomy of China's energy insecurity and its strategies*. USA: Pacific Northwest national laboratory
- Lanteigne, Marc. 2008, China's Maritime Security and the "Malacca Dilemma", dalam *Asian Security* 4 (2), London: Routledge.
- Manning, Robert A. 2000. *The Asia energy factors*. St. Martin's Press.
- McCaskill, John R. 2007. *Energy security: the nexus of national security and energy policy*. <http://www.dtic.mil>. [3 Mac 2012] 2:39 am.

- Rosner, Kevin. 2010. [Closing the gap between energy & national security policy](#). Journal of energy security. <http://www.ensec.org>. [2 Februari 2012] 2:21 am.
- Tow, William . 2007. Strategic dimension of energy competition in Asia. Dlm. Michael Wesley (ed.). *Energy security in Asia*. US & Canada: Routledge
- Uni W.Sagena. 2009. *Memahami keamanan tradisional dan non-tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan interaksi antar aktornya*. Jurnal Dependensia, terbitan Prodi HI UNMUL
- Uni W.Sagena, M.Hasyim Mustamin. 2016. *Understanding energy security concept: approach, perception, and the relevance of East Kalimantan Province*. Paper dipresentasikan pada Borneo Research Council Conference dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman.
- Yaori Shimbung. 18 April 2005.
- Website:
- <http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm>
- <http://www.foreignaffairs.com>
- <http://www.energy-daily.com>
- <http://www.rigzone.com>